

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Peran Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Subsidi Terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Suatu Studi Perbandingan.
Ketua Peneliti	:	Bintoro Wardiyanto
Anggota Peneliti	:	Gatot Pramuko
Fakultas/Puslit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sumber Biaya	:	SPP/DPP tahun 1996/1997, SK Rektor Nomor 6230/J03/PL/1996, tanggal 30 Juli 1996

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974, mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, sebenarnya kedudukan dan peran daerah menjadi semakin besar, terutama upaya daerah untuk mampu mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun demikian, setelah usianya yang ke 22 tahun, upaya memberi peran yang semakin besar terhadap daerah hanya 'tinggal kenangan'. Toh demikian, *political will* pemerintah untuk memberi kewenangan yang besar terhadap daerah tetap besar dan semakin transparan disaat keluar PP No 45/1992 yang menegaskan titik berat otonomi berada di datu II, disamping itu, telah dipilih pula 26 datu II sebagai daerah percontohan otonomi daerah yang ditegaskan melalui SK Mendagri No 105/1994, dan kemudian diperkuat oleh kehadiran PP No 8/1995, tentang penyerahan sebagian urusan kepada Datu II terutama bagi daerah yang menjadi daerah percontohan.

Terkait dengan adanya daerah percontohan, maka sangat menarik jika peran PAD dan subsidi akan dibandingkan dengan daerah lain yang belum sempat terpilih menjadi daerah percontohan, yakni antara Kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten Nganjuk. Dengan alasan tersebut, maka tipe penelitiannya lebih bersifat sebagai '*comparative studies*'. Agar hasil penelitian ini mampu menjelaskan secara lebih utuh, maka metode analisis yang bisa mewakilinya lebih bersifat deskriptif-kualitatif. Karena hendak membandingkan PAD dan subsidi, maka data primer yang digunakan adalah hasil laporan dari Dipenda yang berupa laporan bulanan ataupun rekapitulasi penerimaan daerah.

Dari analisis series, mengenai total penerimaan PAD yang dihitung dalam 3 tahun masa anggaran di Kabupaten Sidoarjo jauh lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan PAD Kabupaten Nganjuk, berbanding 3:1, atau Rp 11.978.930.000 dengan Rp 3.451.344.000. Dan

jika dirinci menurut pos penerimaannya, terlihat bahwa untuk masing-masing pos, besarnya nominal juga jauh lebih besar di Kabupaten Sidoarjo dibanding Kabupaten Nganjuk. Untuk Pos Penerimaan Pajak Daerah (20:1), untuk pos Retribusi Daerah berbanding 2:1, untuk Pos Laba Perusahaan berbanding 4:1, dan untuk penerimaan dari dinas, berbanding 549:1, dan Penerimaan lain berbanding 3:1.

Sedangkan primadona penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan PAD untuk ke dua daerah mempunyai perbedaan, untuk Pajak Daerah di kabupaten Sidoarjo penerimaan primadonanya jatuh untuk Pos penerimaan PPJU, sedang di Nganjuk adalah pajak Kendaraan Tak Bermotor, Sedangkan untuk Retribusi Sempadan/IMB merupakan primadona di Sidoarjo, dan Retribusi Rumah sakit untuk Nganjuk, dan untuk Laba PDAM Delta Tirta merupakan primadona di Sidoarjo, dan Nganjuk pada Perusahaan daerah Aneka Usah yang mengusahakan percetakan dan apotik. Sedangkan untuk Dinas, primadona di Sidoarjo adalah Dinas Kesehatan, sedang di Nganjuk adalah Dinas Peternakan Daerah, berbeda dengan Penerimaan lain, maka di Sidoarjo yang menjadi primadona adalah pos penerimaan lain (pening, sewa listrik, kenal lahir) sedangkan di Nganjuk adalah bagi hasil tanah Bengkok.

Jika membandingkan pendidikan aparat Dispenda, terlihat bahwa akumulasi pendidikan aparat yang banyak ditamatkan oleh Dispenda Sidoarjo sebagian besar lulus SLTA, sedangkan di Nganjuk hanya lulus SD. Dipihak lain, yang lulus Diploma dan Perguruan Tinggi juga lebih banyak Sidoarjo dibanding Nganjuk, dengan demikian jelaslah bahwa kualitas dan kuantitas pendidikan aparat di Sidoarjo jauh lebih baik dibanding dengan Nganjuk.

Walaupun total penerimaan PAD di daerah *pilot project* seperti Sidoarjo sudah cukup tinggi, yakni mencapai 33,49% dari total penerimaan (dibanding Nganjuk hanya 14,63%) namun jika dibandingkan dengan rata-rata subsidi yang diterimanya, mencapai 52,05%, lebih menunjukkan bahwa pengembangan peran PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan subsidi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa, walaupun Sidoarjo sudah ditetapkan sebagai daerah percontohan, namun kenyataannya bayang-bayang ketergantungan terhadap pusat melalui subsidi yang ada juga masih tinggi.